



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099255/2019**

**Revisi ke 03**  
Tanggal : 22 Oktober 2019

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG   |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM   |
| 3. Provinsi                   | : (15)     | KALIMANTAN SELATAN   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (099255) | PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 174.480.000 ( SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Jumlah Uang
Rp.	174.480.000
Rp.	174.480.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	174.480.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                 |           |             |
|-----------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN BARABAI | (110) Rp. | 174.480.000 |
|-----------------|-----------|-------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

JAKARTA, 05 Desember 2018  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099255/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6191-4645-8333-6073

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099255) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Kuasa Pengguna Anggaran : RAFIQAH, ST.  
Bendahara Pengeluaran : NOORLAILA WARDHANI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : BAIDHOWI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			174.480.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			174.480.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			174.480.000
Sasaran Program	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum			
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124495	Perkara	
	02	Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	118766	Jam Layanan	
	03	Pembinaan tenaga teknis peradilan umum	800	Orang	
	04	Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	25	satker	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum			
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	124495	Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482	Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	3124	Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0	Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	81	Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			174.480.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum			
	02	Pos bantuan hukum			
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung			
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu			
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	312	Jam Layanan	31.200.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	360	Perkara	143.280.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	124000	Perkara	

JAKARTA, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099255/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6191-4645-8333-6073

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099255) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
099255	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	-	174.480	-	-	-	174.480		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	174.480	-	-	-	174.480		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	174.480	-	-	-	174.480		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	-	31.200	-	-	-	31.200	15.04	
01	RM	-	31.200	-	-	-	31.200	110	
1049.005	Perkar Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	143.280	-	-	-	143.280	15.04	
01	RM	-	143.280	-	-	-	143.280	110	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>174.480</b>	-	-	-	<b>174.480</b>		

JAKARTA, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099255/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6191-4645-8333-6073

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099255) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

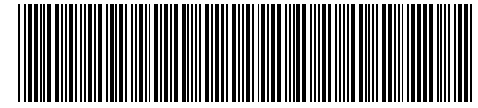
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099255	<b>PENGADILAN NEGERI KANDANGAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	7.147	11.673	10.530	11.926	17.503	11.222	22.553	21.756	11.578	16.197	16.197	16.198	174.480
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	7.147	11.673	10.530	11.926	17.503	11.222	22.553	21.756	11.578	16.197	16.197	16.198	174.480
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	7.147	11.673	10.530	11.926	17.503	11.222	22.553	21.756	11.578	16.197	16.197	16.198	174.480
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.147	11.673	10.530	11.926	17.503	11.222	22.553	21.756	11.578	16.197	16.197	16.198	174.480
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	1.091	724	690	1.137	288	372	274	0	250	0	0	0	4.825
		- PNBP (425232)	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
		- PNBP (425233)	750	420	470	385	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025
		- PNBP (425239)	341	304	220	752	288	372	274	0	0	0	0	0	2.550

JAKARTA, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099255/2019  
IV A. B L O K I R**



DS:6191-4645-8333-6073

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [099255] PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

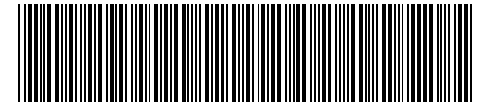
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099255/2019  
IV B. C A T A T A N**



DS:6191-4645-8333-6073

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [099255] PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004